

KOORDINASI DALAM PEMBINAAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJALENGKA

Popy Mulyawati¹, Farida Nurfalih, S.Sos., M.Si.², Drs. Moh. Taufik Hidayat., M.Si.³

^{1 2 3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Swadaya Gunung Jati
Email: haryo.bharoto@ugj.ac.id

DOI : 10.33603/reformasi.v2i2.10939

ABSTRAK

Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul "Koordinasi dalam Pembinaan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Majalengka: Studi Kasus Wanita Tuna Susila di Kecamatan Jatiwangi." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya praktik prostitusi di Kabupaten Majalengka, yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Perlu dicatat bahwa kegiatan tersebut tergolong ilegal dan menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam pengawasan serta penegakan hukum di daerah tersebut. Dinas Sosial berperan sebagai koordinator yang berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penjangkauan. Kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanganan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi studi difokuskan pada Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Majalengka. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dinas Sosial, serta Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan dari Satpol-PP Kabupaten Majalengka. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah metode triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi dalam pembinaan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip koordinasi yang diakui. Teori yang diadopsi dalam penerapan prinsip S. Pamudji mencakup beberapa konsep penting, antara lain: (1) Koordinasi seharusnya dimulai desde awal proses; (2) Koordinasi merupakan suatu tahapan yang bersifat kontinyu; (3) Dalam setiap kemungkinan, koordinasi harus mencakup serangkaian pertemuan yang berlangsung secara bersama; serta (4) Perbedaan pandangan harus diutarakan secara terbuka dan dianalisis hubungannya dengan keseluruhan konteks yang ada.

Kata Kunci: Koordinasi, Pembinaan, Penyakit Masyarakat

PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang telah ada sejak lama di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Praktik pelacuran ini bahkan telah teramati sejak zaman kenabian. Fenomena prostitusi hingga saat ini tetap menjadi permasalahan yang belum teratasi secara tuntas.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik dalam bentuk tindakan preventif maupun represif, untuk menangani permasalahan prostitusi belum menunjukkan hasil yang optimal hingga saat ini.

Keberadaan program terpadu dari pemerintah untuk mengatasi masalah prostitusi masih belum terwujud, yang

mengakibatkan fenomena wanita tuna susila terus berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan melalui peningkatan jumlah wanita tuna susila yang terjadi setiap tahunnya. Praktik prostitusi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari yang terlihat secara terbuka hingga yang disembunyikan atau dilakukan secara terselubung.

Wanita Tuna Susila (WTS) telah eksis di Indonesia sejak lama. Berdasarkan kajian historis, fenomena prostitusi mulai muncul sekitar tahun 1820, bertepatan dengan pembangunan jalan Anyer-Panarukan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Daendels. Selanjutnya, antara tahun 1825 hingga 1830, munculnya jaringan kereta api di Pulau Jawa turut berkontribusi terhadap perkembangan praktik ini.

Pada tahun 1840-an, dengan berdirinya stasiun kereta api, para pekerja konstruksi jalan sering kali terpaksa tinggal jauh dari rumah dan tidak bertemu dengan istri mereka dalam waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan biologis mereka tidak terpenuhi secara optimal, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan praktik prostitusi yang semakin meluas.

Peninggalan budaya ini dapat diamati pada masa kini, di mana kompleks prostitusi umumnya terletak di dekat stasiun kereta api. Contoh yang mencolok dapat ditemukan di Jakarta, khususnya di sekitar Stasiun Kereta Api Senen, Manggarai, Gambir, dan stasiun-stasiun lainnya.

Masalah yang muncul dalam lingkungan sosial sering kali berkaitan dengan norma-norma kehidupan yang berlaku. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah keberadaan Wanita Tuna Susila (WTS). Salah satu isu sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan moral.

Fenomena yang terus berkembang ini sepanjang waktu mengacu pada praktik pelacuran yang lebih umum dikenal dengan istilah pekerja seks komersial (PSK). Praktik tersebut dapat dipahami sebagai suatu bentuk perilaku yang dianggap menyimpang, tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan, atau sebagai suatu manifestasi dari kegagalan individu untuk beradaptasi terhadap norma-norma sosial yang berlaku.

Sebagian wanita yang terlibat dalam aktivitas seksual komersial mengakui bahwa mereka menemukan kepuasan dalam peran mereka sebagai pekerja seks. Pekerjaan sebagai wanita tuna susila sering kali dipandang sebagai pilihan yang menguntungkan, mengingat potensi penghasilan yang dapat diperoleh secara cepat dan mudah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, di balik gambaran tersebut, wanita yang terlibat dalam industri seks komersial sering mengalami konflik internal yang mendalam.

Koentjoro (1996:50) mengemukakan bahwa wanita tuna susila (WTS) senantiasa terlibat dalam konflik internal, yang mencakup pertentangan antara kebutuhan akan uang dan rasa berdosa, serta perasaan tidak aman terkait statusnya sebagai pekerja seks komersial.

Banyak risiko yang harus dihadapi dapat memicu munculnya konflik internal pada wanita pekerja seks komersial.

Risiko yang dihadapi oleh wanita pekerja seks komersial terdiri dari risiko fisik, risiko seksual, dan risiko sosial. Risiko fisik dan risiko seksual yang dihadapi oleh wanita tuna susila (WTS) mencakup, tetapi tidak terbatas pada, kemungkinan penularan penyakit menular seksual (PMS) serta risiko kehamilan yang tidak direncanakan.

Selain itu, kekerasan juga dapat

terjadi dalam konteks prostitusi. Kehidupan wanita tuna susila (WTS) adalah suatu fenomena sosial yang mendapat penolakan dari sebagian segmen masyarakat. Wanita tuna susila (WTS) sering kali dipersepsikan sebagai individu yang terstigma dengan stereotip negatif, sehingga mereka dianggap tidak layak menjadi bagian dari masyarakat.

Di Kabupaten Majalengka, khususnya di Kecamatan Jatiwangi, kegiatan prostitusi memiliki karakteristik dan dinamika yang serupa dengan praktik prostitusi yang ditemukan di kota-kota lain. Meskipun tergolong ilegal, keberadaan fenomena ini sangat meluas dan dapat dengan mudah dijumpai, mirip dengan pertumbuhan jamur pada musim hujan. Baik secara eksplisit maupun melalui kedok usaha seperti fasilitas karaoke, tempat pijat, dan sebagainya.

Biasanya, seorang perempuan yang berprofesi sebagai wanita tuna susila (WTS) cenderung enggan untuk mengungkapkan secara langsung identitasnya sebagai WTS. Sebagai alternatif, individu tersebut lebih memilih untuk menyembunyikan statusnya dengan menjalani pekerjaan di tempat lain. Karena masyarakat Majalengka masih memegang teguh nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku.

Di Kabupaten Majalengka, keberadaan wanita tuna susila (WTS) diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2007 yang mengatur tentang larangan praktik prostitusi. Dalam konteks penertiban dan penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial memegang peranan yang sangat penting. Namun, meskipun telah dilakukan upaya penertiban dan pembinaan terhadap pekerja seks komersial, masalah yang dihadapi tetap ada, yaitu keberadaan wanita tuna susila (WTS) yang masih melanjutkan praktik

mereka.

Fenomena ini disebabkan oleh kurang optimalnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk menertibkan para pekerja seks komersial. Kegiatan yang dilakukan saat ini hanya berlangsung dua kali dalam sebulan.

Penyebab atau alasan yang mendorong para wanita tuna susila (WTS) untuk melakukan atau menjadikan pekerjaan ini sebagai pilihan adalah multifaktorial. Pertama, terdapat aspek kebutuhan biologis yang bersifat adiktif. Kedua, faktor ekonomi berperan signifikan, di mana para individu tersebut tidak hanya berusaha memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencari kepuasan pribadi guna memperoleh barang-barang atau gaya hidup yang mereka inginkan.

Poin ketiga disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam mengendalikan nafsu serta rendahnya dasar keimanannya. Keberadaan wanita tuna susila (WTS) merupakan fenomena yang cukup dikenal dalam konteks kehidupan masyarakat di Kecamatan Jatiwangi. Namun, eksistensi WTS tersebut masih memicu berbagai perdebatan, baik pro maupun kontra, di tengah-tengah masyarakat setempat.

Peralihan masyarakat dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri dapat mengakibatkan transformasi yang signifikan, baik dalam pola kehidupan, nilai-nilai, norma sosial, maupun dalam struktur sosial itu sendiri. Perubahan sosial yang berlangsung di Kecamatan Jatiwangi telah mengakibatkan kemunculan berbagai masalah sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Masalah-masalah ini sering kali timbul sebagai akibat dari perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai yang dianut

oleh masyarakat dan realitas yang dihadapinya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, merupakan tanggung jawab Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Majalengka untuk melakukan pembinaan. Untuk dapat mengatasi permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk melakukan studi yang lebih mendalam dengan mengadakan penelitian yang berjudul “Koordinasi Pembinaan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Majalengka: Studi Kasus Wanita Tuna Susila di Kecamatan Jatiwangi.”

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disampaikan, rumusan masalah yang akan dianalisis dalam kajian ini adalah sebagai berikut. Koordinasi dalam pembinaan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka, khususnya dalam konteks studi kasus wanita tuna susila di Kecamatan Jatiwangi, menunjukkan bahwa proses tersebut belum mencapai tingkat optimal.

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan kolektif yang mengintegrasikan berbagai aktivitas dan elemen yang beragam, sehingga satu sisi dari kegiatan atau elemen tersebut diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, sementara di sisi lain, keberhasilan satu kegiatan tidak mengganggu keberhasilan kegiatan lainnya.

Prinsip-prinsip koordinasi tersebut telah dikemukakan oleh S. Pamudi (2004:41), yang menyatakan bahwa:

1. Koordinasi harus dimulai pada permulaan sekali.
2. Koordinasi adalah merupakan tahapan yang kontinyu
3. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan bersama
4. Perbedaan-perbedaan pandangan

REFORMASI Vol 8 No 2 April 2024

harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki hubungannya dengan keseluruhannya.

Pembinaan dapat diartikan sebagai totalitas kegiatan yang mencakup perencanaan, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa pegawai dapat melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, sehingga tercapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas.

Pembinaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan, keuangan, waktu, metode, dan sistem yang terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Proses ini bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan optimalisasi sumber daya dan hasil yang sebesar-besarnya. (Musaneff, 1991: 11)

Fungsi Pembinaan

Untuk mencapai hasil kerja yang optimal, diperlukan pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi, disiplin, integritas, dedikasi, serta kesadaran akan tanggung jawab yang diemban, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku. Oleh karena itu, fungsi pembinaan perlu diarahkan pada upaya untuk:

1. Membangun dan memupuk kesetiaan serta ketaatan di kalangan pegawai.
2. Meningkatkan rasa pengabdian, tanggung jawab, kesungguhan, dan kegairahan dalam pelaksanaan tugas merupakan faktor penting dalam memfasilitasi efisiensi dan efektivitas kerja.
3. Meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja secara optimal.

4. Mewujudkan layanan yang terorganisir dan profesional bagi organisasi serta pegawai.
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kehidupan pegawai melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan organisasi yang telah ditetapkan.

Secara etimologis, istilah "prostitusi" berasal dari bahasa Latin "pro-stituere," yang secara harfiah berarti membiarkan diri terlibat dalam perbuatan zina, melakukan praktik persundalan, pencabulan, serta pergedungan.

Kata 'prostitute' merujuk pada istilah yang menggambarkan individu yang terlibat dalam perdagangan seksual, yang dalam konteks bahasa Indonesia sering disebut sebagai Wanita Tuna Susila (WTS) atau lebih umum dikenal dengan istilah sundal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah WTS merujuk pada individu yang mengalami nasib malang atau dapat diartikan sebagai aktivitas menjual diri, yang lebih dikenal dengan istilah persundalan, atau orang yang terlibat dalam praktik tersebut.

Prostitusi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pekerjaan di mana individu menawarkan diri atau menjual jasa kepada publik untuk melaksanakan tindakan seksual, dengan imbalan yang telah disepakati sebelumnya.

Individu yang memberikan layanan seksual dalam konteks komersial umumnya dikenal dengan istilah Waria Tindak Seksual (WTS) dan saat ini lebih dikenal dengan sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Berikut adalah beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

Koentjoro menjelaskan bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari praktik seksual di luar institusi pernikahan, yang ditandai oleh adanya

REFORMASI Vol 8 No 2 April 2024

kepuasan dari berbagai individu. Dalam konteks ini, sejumlah pria terlibat dalam aktivitas tersebut dengan tujuan utama memperoleh imbalan finansial, yang dikategorikan sebagai sumber pendapatan.

Pendapat **Sarjana P. J. de Bruine van Amstel** menyatakan bahwa prostitusi dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena di mana wanita memberikan diri mereka kepada sejumlah pria sebagai bentuk transaksi yang melibatkan pembayaran.

Kartini Kartono menyampaikan definisi pelacuran dengan pernyataan bahwa prostitusi merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual. Menurutnya, prostitusi ditandai oleh pola-pola organisasi impuls atau dorongan seksual yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, serta tercermin dalam pelampiasan hasrat seksual yang tidak terkontrol dan melibatkan banyak individu (promiskuitas). Selain itu, praktik ini sering kali disertai dengan eksploitasi dan komersialisasi seks, yang berlangsung secara impersonal dan tanpa adanya ikatan afektif.

Pelacuran dapat didefinisikan sebagai praktik penjualan diri yang melibatkan perdagangan tubuh, kehormatan, dan identitas individu kepada banyak pihak dengan tujuan memenuhi hasrat seksual, yang dilakukan dengan imbalan berupa kompensasi finansial.

Pelacuran dapat didefinisikan sebagai tindakan individu, baik perempuan maupun laki-laki, yang menawarkan tubuhnya untuk kegiatan seksual yang bersifat cabul dengan imbalan finansial.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, diterapkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penyajian data, penulis

mengadopsi pendekatan pemaparan dan ilustrasi untuk menggambarkan situasi atau peristiwa yang relevan. Penulis memanfaatkan berbagai teknik, termasuk wawancara, pengamatan, serta analisis dokumen, guna memperkaya pemahaman terhadap konteks yang diteliti.

Metode yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode naturalistik. Metode naturalistik merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilaksanakan dalam konteks alami, yaitu pada situasi sosial yang tengah berlangsung. Pendekatan yang diterapkan dalam metode naturalistik adalah pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang sedang diteliti dan melakukan analisis mendalam terhadapnya.

Menurut Sugiyono (2013:9), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, yang berbeda dengan pendekatan eksperimen. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data yang diterapkan bersifat triangulasi, yaitu kombinasi dari berbagai sumber data. Analisis data dilakukan secara induktif dengan pendekatan kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi.

Teknik pengambilan informan yang diterapkan oleh penulis adalah purposive sampling. Dalam teknik ini, peneliti melakukan pemilihan dan penetapan beberapa informan yang dianggap berkompeten, yaitu mereka yang memiliki pemahaman mendalam terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2013:218), purposive sampling didefinisikan sebagai metode pengambilan sampel sumber data yang dilakukan berdasarkan

pertimbangan yang khusus dan relevan. Informan merupakan individu yang menyediakan informasi, keterangan, atau data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif ditentukan oleh kebutuhan dan kompleksitas penelitian yang dilakukan. Dalam konteks penelitian kualitatif, terdapat dua tipe informan yang secara fundamental dapat dibedakan, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci merujuk pada individu-individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan informasi yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan pendukung merujuk pada individu-individu yang berada di luar kelompok informan kunci, yang berkontribusi dengan menyediakan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan dalam konteks penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam proses penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data. Aspek ini berkaitan dengan metode pengumpulan data, identifikasi sumber data, serta jenis data yang digunakan. Jenis data berkaitan dengan sumber asal pengumpulan data, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, sementara data sekunder adalah informasi yang diakuisisi melalui sumber yang tidak langsung. Metode pengumpulan data merujuk pada teknik atau pendekatan yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi secara sistematis. Metode dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk memperlihatkan penggunaannya melalui berbagai alat pengumpulan data, seperti angket, wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi, serta metode lainnya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup:

1. Studi Kepustakaan atau Literatur
Penulis melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Lapangan, terdiri dari :
 - a. Observasi
Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti, dengan cara mengadakan penelitian langsung pada obyek yang diteliti.
 - b. Wawancara atau *interview*
Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan para informan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin/terstruktur yang dilakukan secara mendalam (*depth interview*). Kedalaman wawancara ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan diperoleh data atau informasi yang benar-benar lengkap, sehingga peneliti melakukan analisis dengan tajam dan mendalam.
3. Dokumentasi
4. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal berupa foto atau gambar, video, rekaman suara, atau catatan lain yang berguna untuk melengkapi data kaitannya dengan koordinasi dalam pembinaan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif sama maknanya dengan uji

validasi dan uji rehabilitas dalam penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian atau pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bukan angket seperti pada penelitian kuantitatif melainkan peneliti itu sendiri dibantu oleh instrumen lain seperti buku, catatan lapangan, kamera, alat perekam dan lain-lain.

5. Teknik pengujian keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2011:330) teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Melalui metodologi pengujian validitas data, penulis menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber data yang diperoleh melalui proses pemeriksaan, verifikasi ulang, serta pengecekan silang terhadap data tersebut. Triangulasi dapat dilakukan melalui beberapa metode, salah satunya adalah dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara.

Perbandingan antara ungkapan yang disampaikan oleh individu di depan publik dan pernyataan yang diungkapkannya dalam konteks pribadi.

Membandingkan pandangan yang diungkapkan oleh masyarakat mengenai situasi penelitian dengan perspektif yang dimiliki oleh individu dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat umum, individu berpendidikan menengah maupun tinggi, kalangan elit, serta pejabat pemerintah.

Melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan informasi yang terkandung dalam dokumen relevan. Dalam penelitian kualitatif, data dianggap valid dan akurat apabila

memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Salah satu kriteria utama adalah keberadaan konsistensi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan. Data dianggap akurat apabila data atau jawaban yang diperoleh dari informan konsisten untuk pertanyaan yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam jawaban yang diberikan oleh para informan, maka data yang diperoleh dianggap belum dapat dianggap akurat. Peneliti perlu melakukan triangulasi dengan metode pemeriksaan, pengecekan ulang, dan pemeriksaan silang hingga diperoleh data atau informasi yang konsisten.

Terdapat keselarasan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data yang dihasilkan melalui pengamatan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak valid atau tidak akurat. Peneliti perlu melakukan triangulasi kembali melalui serangkaian langkah pemeriksaan, pengujian ulang, dan verifikasi silang untuk memastikan bahwa data atau informasi yang diperoleh konsisten dan dapat diandalkan.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui pendekatan yang mendalam terhadap data deskriptif yang dikumpulkan. Proses ini mengutamakan pemahaman yang kontekstual terhadap data yang ada tanpa menarik kesimpulan yang bersifat universal.

Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik penyelesaian, sehingga data yang dianalisis telah mencapai tingkat kejenuhan.

Aktivitas yang terlibat dalam analisis data mencakup pengurangan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Analisis deskriptif dilaksanakan melalui serangkaian tahap sebagai berikut:

Reduksi Data merujuk pada proses pengolahan data yang telah dikumpulkan, di mana data tersebut dirinci secara sistematis dan mengedepankan elemen-elemen yang esensial yang sesuai dengan fokus serta permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dengan demikian, reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan dan penyaringan terhadap data yang telah dikumpulkan. Data yang telah mengalami proses reduksi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan jelas, sehingga memfasilitasi peneliti dalam melaksanakan analisis.

Penyajian Data merujuk pada proses penyajian informasi dalam berbagai format, termasuk namun tidak terbatas pada deskripsi naratif, grafik, tabel, dan bentuk representasi lainnya. Dalam tampilan data ini, hanya data yang relevan dengan fokus dan permasalahan penelitian yang disajikan.

Kesimpulan Pengambilan/Verifikasi merupakan tahap di mana peneliti berupaya untuk memperoleh makna dari berbagai data yang telah dikumpulkan. Pada fase ini, peneliti menyusun pola, model, tema, serta menganalisis hubungan dan kesamaan yang muncul dari data tersebut. Dengan demikian, proses verifikasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi elemen-elemen yang sering muncul, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara yang logis, melalui proses reduksi dan penampilan data yang telah dianalisis, serta verifikasi yang dilakukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi dalam Pengembangan Penanganan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Majalengka: Analisis Kasus Wanita Pekerja Seks di Kecamatan Jatiwangi.

Pada bab ini, penulis berupaya untuk menyajikan analisis hasil penelitian yang berjudul "Koordinasi dalam Pembinaan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Majalengka: Studi Kasus WTS di Kecamatan Jatiwangi". Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang dilakukan, penulis mengidentifikasi sejumlah temuan yang tidak sejalan dengan upaya pembinaan penyakit masyarakat yang telah dilakukan.

Koordinasi merupakan upaya yang bertujuan untuk mengarahkan dan menyatukan kegiatan serta situasi kerja, sehingga seluruh elemen dapat beroperasi secara terintegrasi dan kohesif dalam rangka mencapai tujuan bersama. Koordinasi mengandung makna adanya integrasi yang harmonis dan dilaksanakan melalui serangkaian tindakan yang terlibat dalam setiap aktivitas kerja.

Pertumbuhan organisasi berkaitan erat dengan peningkatan beban kerja serta fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Pertumbuhan ini juga membawa implikasi berupa penambahan jabatan atau pejabat, yang memerlukan upaya koordinasi yang efektif. Dalam situasi seperti ini, koordinasi akan menjadi kompleks. Namun demikian, seorang pemimpin tetap perlu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Koordinasi merupakan proses yang esensial dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian upaya yang strategis untuk

mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut. Salah satu upaya yang diambil oleh pimpinan adalah melakukan koordinasi antara berbagai unsur dan lembaga yang terlibat, agar dalam pelaksanaan langkah-langkahnya dapat berjalan secara harmonis sesuai dengan harapan pimpinan.

Demikian pula, pembinaan terhadap Wanita Tuna Susila, yang merupakan bagian dari upaya penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka, memerlukan kerjasama yang efektif antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kedua instansi ini harus mampu melaksanakan koordinasi yang baik, agar tujuan pembinaan terhadap wanita tuna susila dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Prinsip-prinsip koordinasi yang dimaksud sesuai dengan uraian yang diajukan oleh S. Pamudji sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi seharusnya diinisiasi pada tahap awal.
2. Koordinasi merupakan tahap yang bersifat kontinyu.
3. Sepanjang kemungkinan, koordinasi seharusnya melibatkan pertemuan-pertemuan bersama.
4. Perbedaan pandangan perlu disampaikan secara terbuka dan perlu dilakukan penelitian untuk menyelidiki keterkaitannya dengan keseluruhan konteks.

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip koordinasi sebagai berikut:

1. Koordinasi harus dimulai dari permulaan sekali

Prinsip Koordinasi yang diutarakan oleh S. Pamudji menekankan bahwa langkah pertama dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan adalah penyusunan rencana kerja. Proses ini

terlebih dahulu memerlukan pembagian kerja yang jelas, serta penetapan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unit organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak dapat berlangsung secara kebetulan, melainkan harus didasarkan pada pedoman yang telah integratif dalam proses perencanaan. Dengan adanya perencanaan yang matang, berbagai bentuk kesimpangsiuran dapat dicegah, termasuk dalam pelaksanaan koordinasi itu sendiri. Parameter pelaksanaan rapat internal dan penyelesaian tugas fungsi pegawai koordinasi Dinas Sosial serta Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) dapat diuraikan sebagai berikut: *komunikasi antara instansi dan pembina atau aparat dalam konteks pembinaan terhadap penyakit masyarakat, khususnya terkait wanita tuna susila di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.*

Hingga saat ini, komunikasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) berlangsung dengan baik dalam upaya pembinaan terhadap Wanita Tuna Susila (WTS). Proses penjangkaran yang dilakukan oleh Satpol-PP senantiasa melibatkan kerjasama yang erat dengan Dinas Sosial. Setelah proses penjangkaran, Satpol PP menyerahkan hasilnya kepada Komisi. Komunikasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial sebelum pelaksanaan operasi penjangkaran terhadap wanita tuna susila (WTS) dilakukan dengan baik, dengan mengikuti prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan untuk kegiatan tersebut.

Penyelesaian Tugas dan Fungsi Pembina atau aparat dalam memberikan Pembinaan kepada Wanita Tuna Susila (WTS) di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

Tercapainya efektivitas pembinaan terhadap Wanita Tuna Susila (WTS) di Kabupaten Majalengka sangat

bergantung pada arahan dan strategi yang diterapkan oleh masing-masing instansi terkait dalam menyelesaikan tugas dan fungsi dari setiap pembina atau aparat. Hal ini harus disesuaikan dengan kedisiplinan, kompetensi, dan keahlian mereka dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing.

Anggota atau pegawai menunjukkan tingkat disiplin yang sangat baik dan mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Setiap individu memiliki tanggung jawab yang jelas dalam memberikan pembinaan terhadap penyakit masyarakat, salah satunya adalah program pembinaan untuk Wanita Tuna Susila (WTS). Disiplin yang tinggi ini tercermin dalam komitmen mereka untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, serta mengikuti prosedur pelaksanaan yang telah disepakati bersama.

Koordinasi merupakan tahap yang bersifat kontinyu. Dalam konteks unsur koordinasi, terdapat pengertian bahwa setiap elemen kepemimpinan diharapkan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai bagian atau unit kerja yang saling terkait dalam upaya mencapai tujuan. Proses ini seharusnya dilaksanakan secara berkelanjutan, tanpa henti. Demikian pula, Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Majalengka dalam pembinaan terhadap Wanita Tuna Susila (WTS) diharapkan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai bagian dan unit organisasi yang terlibat dalam proses kerja. Hal ini penting agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan, mengingat proses tersebut memerlukan kerjasama yang erat dengan berbagai bagian atau unit kerja terkait. Penting bagi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Majalengka untuk memastikan bahwa unit kerja yang terkait

merasa dihargai keberadaannya dalam proses penyelesaian tugas. Keterlibatan yang berkelanjutan dan terus-menerus dari unit-unit tersebut sangat diperlukan, karena kurangnya partisipasi dapat menyebabkan kesulitan bagi Dinas Sosial maupun Satpol-PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.

Koordinasi yang efektif sangat diperlukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) mengingat pentingnya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh para pelaksana. Mengingat kompleksitas kegiatan yang melibatkan banyak pihak, terdapat kecenderungan yang lebih tinggi untuk memastikan penerapan prosedur kerja yang tepat. Sistem dan mekanisme operasional dalam pelaksanaan suatu tugas pekerjaan. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan terhadap gejala negatif yang mungkin timbul. Dalam pelaksanaan koordinasi untuk mencapai tujuan, terdapat berbagai pendekatan yang dapat diambil. Salah satu pendekatan yang efektif adalah menciptakan kesinambungan dalam proses koordinasi, mengingat bahwa koordinasi merupakan kegiatan yang bersifat berkelanjutan. Parameter dari jadwal pelaksanaan koordinasi aparat dan pelaksanaan rapat untuk mengambil keputusan terkait koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam Pembinaan Penyakit Masyarakat atau Wanita Tua Susila adalah sebagai berikut:

Jadwal pelaksanaan Rapat

Jadwal pelaksanaan rapat telah ditetapkan oleh Dinas Sosial serta Satuan Polisi Pamong Praja, dan pelaksanaan rapat koordinasi berlangsung dengan lancar. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi, kehadiran perwakilan dari Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) senantiasa menjadi hal yang penting. Keberadaan mereka

bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan terarah serta mencapai hasil yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi.

Koordinasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan

Sering melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memastikan kelancaran dalam pembinaan wanita tuna susila (WTS).

2. Sepanjang Kemungkinan Koordinasi harus merupakan Pertemuan-pertemuan Bersama

Dalam prinsip koordinasi ini terkandung pemahaman bahwa setiap komponen kepemimpinan dalam pelaksanaan koordinasi diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan situasi di mana setiap individu atau anggota yang terintegrasi diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide, pandangan, atau pendapat mereka secara bebas. Hal ini dilakukan tanpa adanya rasa takut, dan diharapkan berlandaskan pada data yang valid serta disampaikan dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan rumusan kebijakan yang bermanfaat. Oleh karena itu, kebebasan yang diberikan perlu dilengkapi dengan aturan-aturan yang jelas. Hal ini bertujuan agar perbedaan pandangan yang muncul dapat disampaikan secara sopan, adil, dan rasional. Dalam konteks perbedaan suatu isu atau kebijakan, perbedaan tersebut dapat dianggap wajar. Namun, penting untuk menegaskan bahwa perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui musyawarah. Dengan demikian, dalam pelaksanaan kerja, perhatian seluruh anggota diperlukan untuk menjamin stabilitas kerja bagi semua pihak yang

terlibat. Jalan yang paling efektif dalam menghadapi permasalahan adalah melalui pendekatan keterbukaan, yang memungkinkan identifikasi masalah secara lebih jelas. Dengan demikian, proses pencarian solusi yang paling tepat dapat dilakukan dengan lebih efisien. Pertemuan yang dilakukan secara kolaboratif antara unit kerja terkait bertujuan untuk melakukan pertukaran informasi, serta menjalin kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Hal ini dilakukan dengan penyesuaian terhadap pelaksanaan rencana dan program kerja masing-masing unit, serta untuk meningkatkan hasil yang dapat dicapai secara optimal. Parameter dalam menerima perbedaan pendapat dan mengakomodasi masukan dari berbagai pihak adalah sebagai berikut dalam konteks koordinasi dalam pembinaan penyakit masyarakat:

Menerima Perbedaan Pendapat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)

“Metode yang paling efektif untuk mengatasi perbedaan pendapat adalah dengan mengakui dan menerima keberadaan perbedaan tersebut. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap perspektif masing-masing pihak yang terlibat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.”

“Ya, karena kita sangat menjunjung tinggi prinsip demokrasi dengan menerima dan mempertimbangkan semua masukan dari berbagai pihak.”

Menerima Masukan dari berbagai pihak yang terkait

"Kami dengan sepenuh hati menerima semua masukan yang diberikan oleh berbagai pihak. "

Berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) secara konsisten menerima masukan dari berbagai pihak terkait dalam konteks Pembinaan Wanita Tuna Susila. Karena hanya individu atau entitas yang bersangkutan yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan yang diperlukan.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti juga melaksanakan wawancara dengan sejumlah mantan wanita tuna susila yang berada di bawah program pendampingan Dinas Sosial Majalengka. Hasil wawancara yang diperoleh dari keterangan individu Y dan L adalah sebagai berikut:

“Profesi sebagai wanita tuna susila (WTS) telah ada sejak lama. Selalu terdapat komunikasi yang konstruktif antara kami dan Dinas Sosial serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) mengenai masalah pembinaan yang akan kami terima.”

Faktor yang mendukung dan menghambat koordinasi dalam pembinaan penyakit masyarakat pada Dinas Sosial dan Satpol-pp di Kabupaten Majalengka

Faktor Pendukung

Dalam konteks pembinaan mental dan pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan yang merupakan mantan pekerja seks komersial, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari adanya berbagai faktor pendukung yang memengaruhinya.

Faktor-faktor pendukung yang berperan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan serta rehabilitasi sosial bagi mantan pekerja seks komersial terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satu kategori tersebut adalah faktor pendukung internal, di mana salah satu unsur yang paling penting adalah sumber daya

manusia. Sumber daya manusia memiliki peranan krusial dalam mengelola dan melaksanakan berbagai program dan layanan yang ditujukan untuk mendukung proses rehabilitasi sosial tersebut. Dalam konteks ini, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kualifikasi masing-masing individu. Pertama, untuk posisi pimpinan, ditentukan kualifikasi yang mengharuskan individu tersebut memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan dalam bidang pekerjaan sosial. Memiliki pengalaman di bidang sosial dan telah mengikuti pelatihan manajemen kepemimpinan di Balai selama tiga bulan. (2) Tenaga administrasi harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SLTA) dengan penekanan pada bidang administrasi, yang mencakup kursus spesifik dalam administrasi serta pengalaman dalam pelatihan yang berkaitan dengan administrasi. (4) Tenaga pelaksana teknis harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: (a) untuk fungsional pekerja sosial, harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang pekerjaan sosial dan telah mengikuti pelatihan dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial di lembaga terkait; (b) untuk instruktur, harus memiliki sertifikat yang relevan dengan bidang pengajaran, misalnya, instruktur menjahit wajib memiliki sertifikat menjahit yang diperoleh dari lembaga pendidikan formal atau informal, serta adanya kesepakatan bersama mengenai jadwal pelayanan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat juga perlu diidentifikasi dan dianalisis.

Faktor Penghambat

Dalam konteks penguatan mental dan pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan yang pernah terlibat dalam praktik pekerja seks komersial, diperlukan pendekatan yang

komprehensif dan sensitif terhadap kondisi mereka. Faktor-faktor yang menghambat dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Faktor Penghambat Internal:

a) Aspek yang berkaitan dengan perempuan mantan pekerja seks komersial atau penerima manfaat, yakni rendahnya kesadaran para penerima manfaat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan. Selain itu, kualitas pendidikan yang rendah di antara para penerima manfaat menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan yang efektif.

b) Ketersediaan peralatan keterampilan kerja yang masih kurang, yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah alat yang tersedia dan jumlah individu yang membutuhkan pelatihan.

2) Faktor Penghambat Eksternal:

a) Aspek yang berasal dari masyarakat, di mana terdapat individu atau kelompok yang berupaya untuk mencabut atau mengeluarkan mantan pekerja seks komersial dari lembaga rehabilitasi, termasuk keluarga, geromo, dan preman.

b) Adanya asumsi negatif yang berkembang di masyarakat mengenai mantan pekerja seks komersial, yang dapat menghambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembinaan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka

Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam menangani permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka dapat dicapai melalui pendekatan yang mengintegrasikan tindakan preventif dan represif.

1. Melaksanakan program penyuluhan

kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak remaja dan orang tua, mengenai masalah kesehatan masyarakat, dengan fokus pada isu-isu seperti perjudian, minuman keras, dan praktik pelacuran. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, khususnya terkait dengan minuman keras, prostitusi, dan perjudian di kalangan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran penyakit masyarakat yang semakin meluas.

2. Melakukan identifikasi terhadap lokasi-lokasi yang sering digunakan sebagai tempat lokalisasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melaksanakan pembinaan di area tersebut.

KESIMPULAN

1. Koordinasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) dalam upaya pembinaan Wanita Tuna Susila (WTS) di Kabupaten Majalengka telah menunjukkan optimalitas yang signifikan. Hal ini tercermin dari keselarasan dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan, sehingga pembinaan terhadap penyakit masyarakat dapat dilakukan dengan efektif.
2. Faktor-faktor yang mendukung serta menghambat koordinasi dalam pembinaan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka mencakup sejumlah aspek, antara lain:
 - a. a. Faktor pendukung yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) mengindikasikan bahwa setiap sektor yang terlibat dalam pembinaan warga binaan harus memiliki keahlian yang spesifik sesuai dengan bidang

tugasnya masing-masing.

- b. b. Faktor penghambat mencakup karakteristik individu yang terdapat pada warga binaan itu sendiri, yang sering kali ditandai oleh tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya kesadaran di antara mereka. Hal ini menyebabkan proses pembinaan menjadi sulit untuk diimplementasikan dan diterima secara efektif. Selain itu, terdapat juga kendala terkait dengan ketidakcukupan alat operasional yang digunakan dalam proses pembinaan, serta adanya stigma negatif yang berkembang di masyarakat terhadap warga binaan, yang turut memperumit upaya rehabilitasi mereka.
3. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka, antara lain melalui penyuluhan yang ditujukan kepada setiap lapisan masyarakat, dengan fokus khusus pada kalangan remaja, serta didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Melalui penerapan metode penjangkaran, penelitian ini akan fokus pada lokalisasi yang sering dimanfaatkan untuk aktivitas pelacuran.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan aspek koordinasi dalam penanganan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka, khususnya dalam konteks studi kasus mengenai Wanita Tuna Susila (WTS) di Kecamatan Jatiwangi, perlu dilakukan perhatian yang lebih mendalam terhadap fenomena ini. Penanganan wawasan

terkait WTS seharusnya dilakukan secara rutin melalui upaya penjangkaran yang sistematis, sehingga dapat mencegah peningkatan jumlah Wanita Tuna Susila di Kabupaten Majalengka. Disarankan agar prinsip-prinsip koordinasi diterapkan secara lebih mendalam untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pembinaan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka.

2. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam koordinasi pembinaan penyakit masyarakat adalah terbatasnya operasional dalam proses pembinaan. Selain itu, baik saat mengadakan rapat maupun di luar forum tersebut, terdapat kurangnya kesempatan bagi seluruh instansi terkait untuk menyampaikan pandangan dan perbedaan pendapat mengenai pembinaan penyakit masyarakat.
 - a) Sebagian besar warga binaan masih mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, disarankan agar pihak dinas sosial mempertimbangkan untuk menambah waktu pembelajaran bagi warga binaan, guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan.
 - b) Menambah sejumlah alat operasional yang saat ini masih kurang, sehingga pelaksanaan pembinaan yang diberikan dapat berlangsung dengan lebih optimal.
3. Langkah-langkah yang diambil selama kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok remaja yang sangat rentan terhadap berbagai masalah sosial, termasuk pelacuran, memerlukan kolaborasi yang efisien antara dua (2)

instansi serta peran aktif tokoh masyarakat. Kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan masalah yang dihadapi. Melaksanakan pembinaan bagi warga binaan bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar kelak dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dinas Sosial, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas proses pembinaan ini, telah menjalankan tugasnya dengan sangat optimal. Upaya yang dilakukan ditujukan untuk membantu warga binaan melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin telah melekat pada diri mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Handayningrat, Soewarno Handayaningrat. 1990, *pengantar studi ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT.Dharma Utama
- Herujito, Yayat M, 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo
- Moekijat, 2002. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Alumni, Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: PT Sinar Baru Algesindo.
- Simanjuntak. B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsit.
- S. Pamuji, 2004, *Praktek Organisasi dan Metode (O dan M) Institut Ilmu Pemerintahan*, Jakarta.
- Sugandha, Dann. 1998. *Koordinasi Alat*

Pemersatu Gerak Administrasi.
Jakarta. Cv Intermedia.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*
Bandung: Alfabeta

Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Majalengka No 14
Tahun 2007 tentang Larangan
Prostitusi

Lain-lain

Teknik Penyusunan Proposal Skripsi (Dr.
Moh. Taufik Hidayat: 2020)

Akses Internet:

<http://xerma.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html>